

HUBUNGAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PENGGUNAAN MEDIA
DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL (JKN)
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

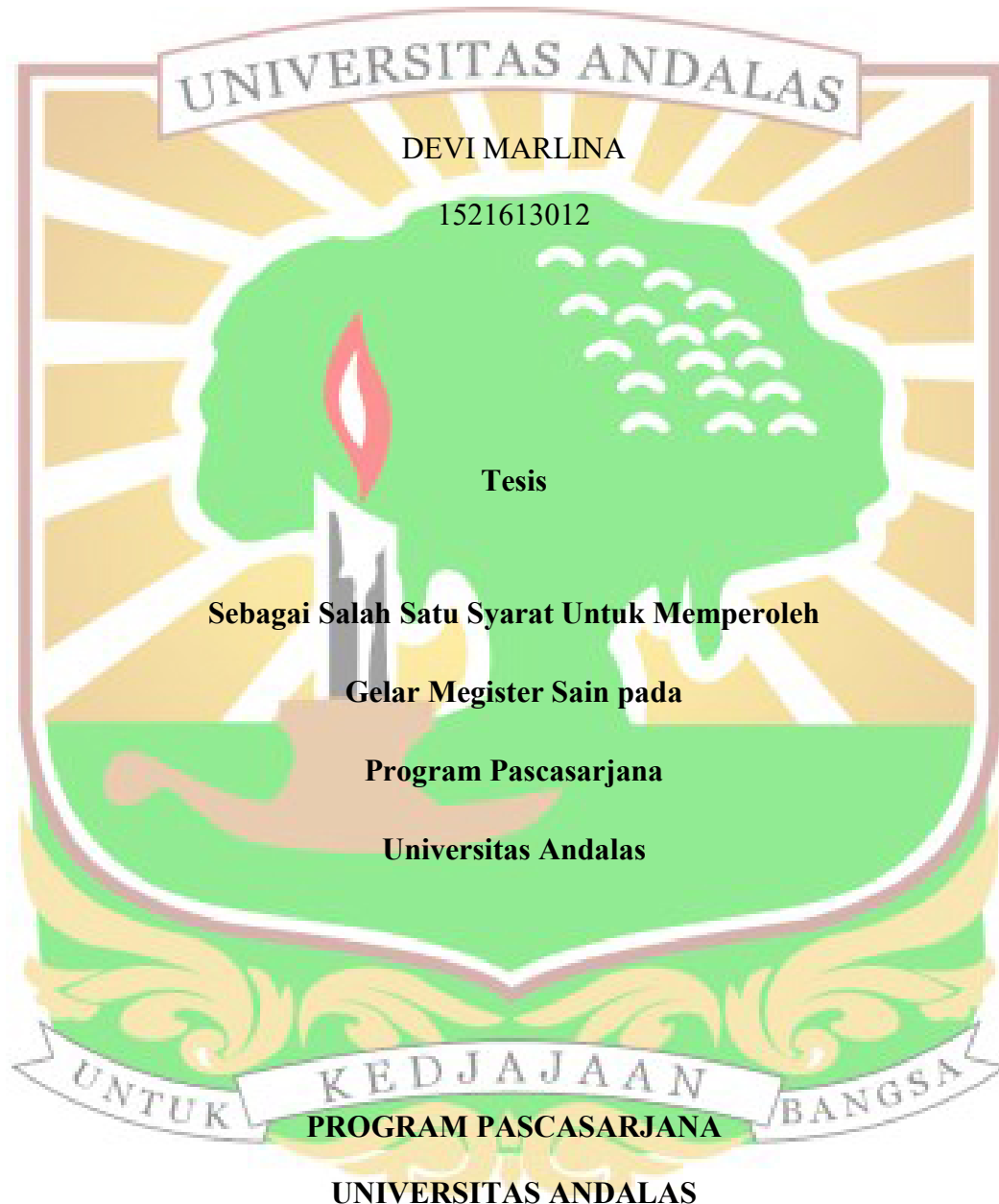


PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ANDALAS

2020

HUBUNGAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PENGGUNAAN MEDIA
DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL (JKN)
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : HUBUNGAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN
PENGUNAAN MEDIA DENGAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

Nama Mahasiswa : DEVI MARLINA

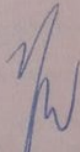
Nomor Pokok : 1521613012

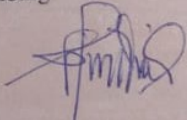
Program Studi : Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

Tesis telah diuji dan dipertahankan di depan sidang ujian akhir Magister
Sain pada Program Pascasarjana Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada
tanggal 21 Oktober 2020

Menyetujui,

1. Komisi pembimbing

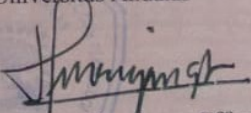

Prof. Dr. Erwin, Msi
Ketua


Drs. Namudin, M.Ed. Ph.D
Anggota

2. Koordinator Program Studi

Dr. Ir. Ira Wahyuni Syarfi, MS
NIP. 19630531 198810 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana
Universitas Andalas


Prof. Dr. rer. soz. Nusvirwan Effendi
NIP. 19640624 199001 1 002

Bismillahirrahmanirahim

Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati padahal kamulah orang yang paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang yang beriman (Q.s Ali Imran.39)

Sungguh kesukaran itu pasti ada kemudahan. Oleh karena itu, jika kamu telah selesai dari suatu tugas, kerjakanlah dengan tugas yang sungguh-sungguh dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kau memohon dan mengharap (Q.s Al Insyirah.6-8)

Alhamdulillahirabbil Alamin....

Rasa syukur berlimpah hanya kepada Allah..

Manjadda wajada....

Kata sakti yang membuat aku bangkit

Meskipun jalan yang ditempuh terjal dan sulit

Tak menyurutkan semangatku walau sedikit

Aku percaya janji Allah pasti

Walau sulit tetap ku jalani

Karena tidak ada yang berharga didunia ini

Selain senyum bangga dibibir orang tua ku

Saat ku persembahkan karya ini...

Terima kasih kepada alm. Papa Nismar dan mama tercinta Ratnawati Tetesan keringat, jerih payahmu, doamu selalu menyertai langkahku. Dukungan papa dan mama adalah kekuatan terdahsyat ananda dalam menyelesaikan karya ini

Terima kasih juga buat suami tercinta dan anak-anak tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasinya sehingga menghasilkan karya ini

Penghormatan dan terima kasih juga buat Papa dan mama mertua serta kakak serta adek ipar dan keluarga laiannya juga terima kasih buat sahabat-sahabat dan teman-teman seksi promkes.

Ya Allah tambahkan la kepadaku ilmu penegtahuan, karena sesungguhnya kebahagiaan, kedamaian dan ketentrman hati senantiasa berawal dari ilmu penegtahuan

By. Devi marlina

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama DEVI MARLINA, lahir di Bukit Sikumpar, 1 Juli 1981. Penulis merupakan anak ke-1 dari 2 bersaudara dari pasangan (alm) Papa Nismar dan Mama Ratnawati. Penulis menikah dengan Tatang Kurniawan dan memiliki 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Beralamat di Jorong Padang Belimbing, Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Menempuh pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 1988-1994 di SDN No 30 Bukit Sikumpar, Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota, SLTP pada tahun 1994-1997 di SLTP Negeri 2 Luhak, Pakan Rabaa Kabupaten Lima Puluh kota, SLTA pada tahun 1997-2000 di SMU Negeri 2 Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sarjana (S1) tahun 2000-2004 di S1 Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baiturrahmah Padang. Pada tahun 2015 -2020 penulis berkesempatan untuk melanjutkan studi S2 pada Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Pascasarjana, Universitas Andalas. Selanjutnya dari tahun 2012 sampai dengan sekarang penulis bekerja sebagai Staf Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.



PERNYATAAN

Dengan ini saya, nama : Devi Marlina yang beralamat di Jorong Padang Belimbing, Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Ireh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota (26262), menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dicantumkan dalam naskah dan disebut dalam daftar kepustakaan.

Padang, 21 September 2020

Penulis,

Devi Marlina



HUBUNGAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PENGGUNAAN MEDIA DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

Oleh: Devi Marlina (1521613012)

(Dibawah bimbingan Prof. Dr. Erwin. M.Si dan Drs. Nadjmudin, M.Ed. Ph.D)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keterbukaan informasi, penggunaan media program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Partisipasi masyarakat untuk ikut jadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun metoda yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah metoda penelitian kuantitatif dengan menggunakan teori Andersen. Responden pada penelitian ini berjumlah 381 sampel, dimana untuk mendapatkan informasi dari responden menggunakan kuesioner dan kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Package for social Sciences*). Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan korelasi *rank Spearman* didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keterbukaan informasi dengan partisipasi masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), selanjutnya juga terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan media dengan partisipasi masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kata kunci: Keterbukaan Informasi, Penggunaan Media, Partisipasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)



THE RELATIONSHIP BETWEEN INFORMATION DISCLOSURE AND MEDIA USE IN THE NATIONAL HEALTH INSURANCE PROGRAM WITH PUBLIC PARTICIPATION IN THE NATIONAL HEALTH INSURANCE (JKN) PROGRAM IN LIMAPULUH KOTA REGENCY

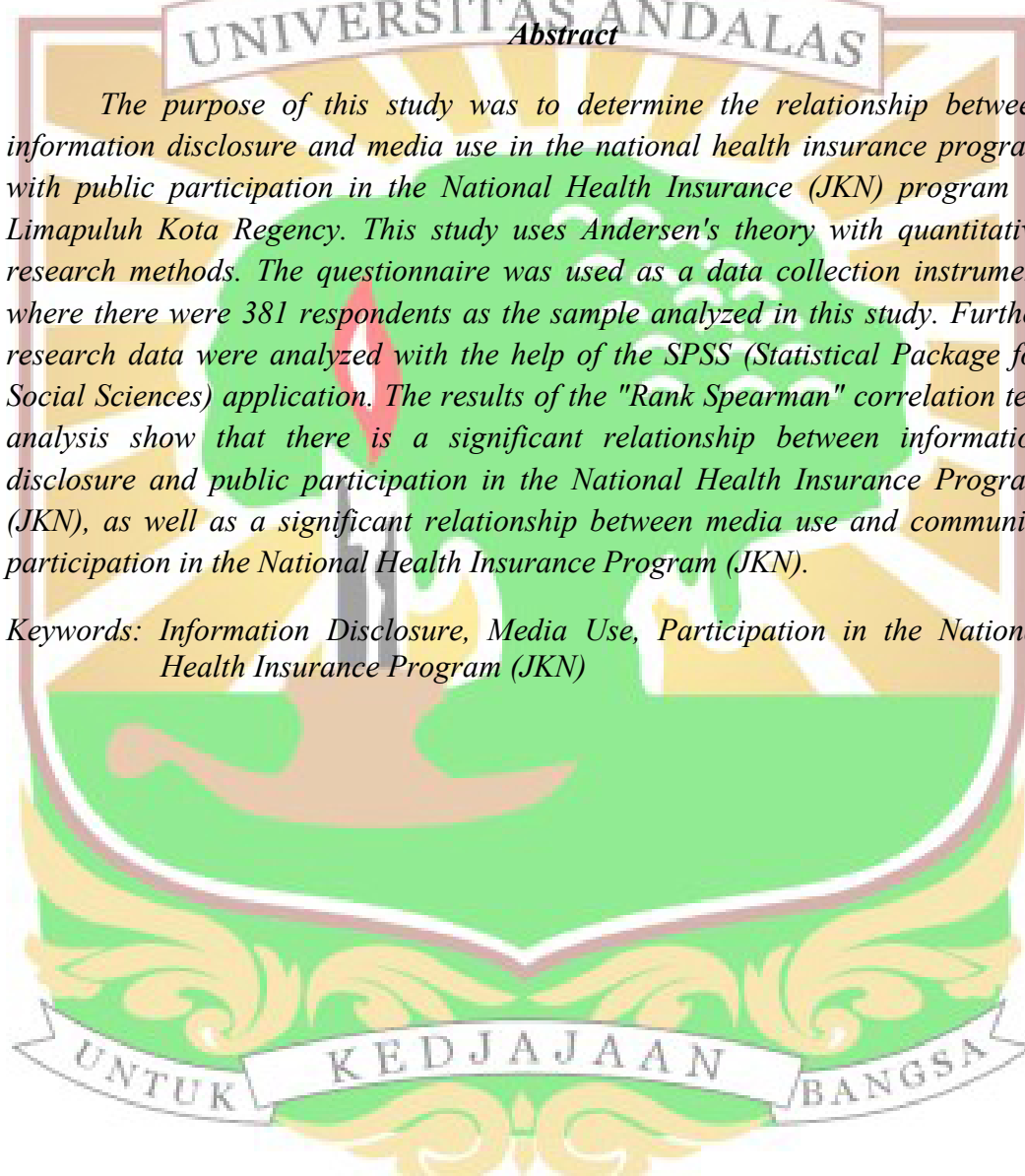
By: Devi Marlina (1521613012)

(Supervised by : Prof. Dr. Erwin. M.Si end Drs. Nadjmudin, M.Ed. Ph.D)

Abstract

The purpose of this study was to determine the relationship between information disclosure and media use in the national health insurance program with public participation in the National Health Insurance (JKN) program in Limapuluh Kota Regency. This study uses Andersen's theory with quantitative research methods. The questionnaire was used as a data collection instrument where there were 381 respondents as the sample analyzed in this study. Further research data were analyzed with the help of the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) application. The results of the "Rank Spearman" correlation test analysis show that there is a significant relationship between information disclosure and public participation in the National Health Insurance Program (JKN), as well as a significant relationship between media use and community participation in the National Health Insurance Program (JKN).

Keywords: Information Disclosure, Media Use, Participation in the National Health Insurance Program (JKN)



KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas taufik dan hidayahnya penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini. Judul penelitian ini adalah: “Hubungan Keterbukaan Informasi dan Penggunaan Media dengan Partisipasi Masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam penyempurnaan tesis ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak Prof. Dr. Erwin, M.Si sebagai ketua komisi pembimbing dan bapak Drs. Nadjmudin, M.Ed. Ph.D sebagai anggota komisi pembimbing. Selanjutnya ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada bapak Prof. Ir. Yonariza, M.Sc, Ph.D, bapak Dr. Ir. Faidil Tanjung, M.Si dan ibu Dr. Ir. Ira Wahyuni Syarfi, MS selaku dosen penguji yang turut memberikan kritikan positif demi perbaikan penulisan Tesis kearah yang lebih baik. Serta ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Ir. Ira Wahyuni Syarfi, MS selaku Koordinator Program studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan.

Penulis juga menyampaikan hormat dan terimakasih kepada orang tua tercinta, Papa alm. Nismar dan Mama Ratnawati yang selalu mendokan dan senantiasa melimpahkan kasih sayang serta dukungan kepada penulis. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada suami tercinta Tatang Kurniawan, serta anak-anak tersayang Aisha Aurellia Devta, Zerrin Aurellia Devta dan Muhammad Rafka Abyan yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat dekat yang ikut serta membantu dalam proses pembuatan Tesis ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada staf akademis Program studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Unand angkatan 2015 atas kebersamaan dan kesediaannya berbagi cerita dan memberikan pengalaman berharga selama masa studi.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil-hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini akan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Padang , September 2020



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pembangunan Wilayah dan Pedesaan.....	9
B. Otonomi Daerah.....	10
C. Pelayanan Publik.....	11
D. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).....	13
E. Partisipasi.....	24
F. Keterbukaan Informasi.....	30
G. Penggunaan Media	32
H. Penelitian Terdahulu.....	33
I. Definisi Konsep.....	34
J. Kerangka Pemikiran	34
K. Hipotesis Penelitian.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. Rancangan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Populasi dan Sampel	36
D. Teknik Penentuan Sampel	37
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisa Data	39
G. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	40
BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.....	44

B. Karakteristik Responden.....	47
C. Keterbukaan Informasi.....	49
D. Penggunaan Media	51
H. Partisipasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).....	51
I. Partisipasi dalam Program JKN.....	52
L. Hubungan antara Keterbukaan Informasi (Media Informasi, Akses Informasi) dengan Partisipasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).....	53
M. Hubungan antara Penggunaan Media dengan Partisipasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).....	54
N. Pembahasan Penelitian.....	55
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	59
LAMPIRAN.....	63



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 sampai Tahun 2018.....	6
Tabel 2. Tipologi partisipasi masyarakat (Fatimah, 2012) yaitu:.....	27
Tabel 3. Variabel, Defenisi Operasional, tingkat pengukuran Sumber informasi dan Akses Informasi.....	40
Tabel 4. Variabel, Defenisi Operasional, tingkat pengukuran Poster / barner dan leaflet / Brosur	42
Tabel 5. Variabel, Defenisi Operasional, tingkat pengukuran partisipasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasioanal (JKN), status kepesertaan, kepatuhan membayar, pemanfaat kartu JKN, mengajak orang lain dan melakukan pengawasan.....	43
Tabel 6. Luas Wilayah , Jumlah Nagari/Jorong Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017	45
Tabel 7. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota	47
Tabel 8. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Golongan Umur di Kabupaten Lima Puluh Kota	47
Tabel 9. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Pernikahan di Kabupaten Lima Puluh Kota	48
Tabel 10. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota	48
Tabel 11. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tempat Tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota	48
Tabel 12. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Pekerjaan di Kabupaten Lima Puluh Kota	49
Tabel 13. Sumber Informasi Responden	49
Tabel 14. Akses Informasi Responden.....	50
Tabel 15. Penggunaan Media Responden	51
Tabel 16. Partisipasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	52
Tabel 17. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Partisipasi dalam Program JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota	52
Tabel 18. Hubungan antara Keterbukaan Informasi (Media Informasi, Akses Informasi) dengan Partisipasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2017	53

Tabel 19. Hubungan antara Penggunaan Media dengan Partisipasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017	54
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep pemikiran.....	Halaman 35
--	----------------------



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian	64
Lampiran 2. Data Responden Penelitian.....	68
Lampiran 3. Hasil Pengolahan dan Analisa Data.....	76
Lampiran 4. Hasil Uji Hipotesis	80



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah perubahan yang akan mengantarkan kita ke arah yang lebih baik. Pembangunan tersebut tidak hanya memperhatikan aspek fisik namun juga dimensi sosial dan ekonomi yang erat kaitannya dengan masyarakat. Pemerintah sebagai salah satu pelaksana pembangunan diharapkan memiliki aparat yang kompeten apalagi dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah dari “dilayani menjadi melayani” dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Riyadi dan bratakusuma, 2005).

Menurut Dwiyanto (2015) Ada banyak alasan mengapa pelayanan publik menjadi poin strategis dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia. Pertama, selama ini pelayanan publik merupakan suatu wadah yang menjembatani hubungan suatu Negara atau di sebut juga pemerintah untuk berintergrasi dengan dengan lembaga swadaya masyarakat. Kedua, layanan publik juga merupakan wadah agar berbagai aspek *good governance* dapat dimengerti dengan mudah. Dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik, aspek kelembagaan sering dijadikan acuan untuk mengevaluasi praktek pemerintahan (*governance*). Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan seluruh elemen pemerintahan.

Implementasi *good governance* didukung dengan adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang secara substansial mengatur dan memberikan kepastian hukum antara masyarakat adalah bahwa Negara melindungi segenap warga negaranya dalam memenuhi hak dan melaksanakan kewajibannya untuk mendapatkan pelayanan publik. Pelayanan publik dalam Undang-undang ini diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat atas barang/jasa oleh aparatur Negara sebagai penyelenggara pelayanan publik tersebut.

Pembangunan mencerminkan keseluruhan perubahan di masyarakat atau penyesuaian seluruh sistem sosial yang ada, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan aspirasi individu maupun kelompok sosial yang ada di dalamnya, sehingga bergerak menuju keadaan kehidupan material dan spiritual

yang lebih komprehensif (Syarifudin, 2008). Saat ini, pembangunan semua aspek kehidupan sedang berlangsung secara terus menerus. Pemerintah memberikan bantuan keuangan untuk mendukung keberhasilan pembangunan ini. Bentangan luas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat, budaya dan suku bangsa, serta keanekaragaman tomografi dan demografi daerah menjadi salah satu penghambat pembangunan (Depkes, 2012).

Dalam pembangunan, peran serta masyarakat sangat penting. Tanpa peran masyarakat, tujuan pembangunan ini akan sulit tercapai. Pembangunan yang sehat merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dalam proses ini masih terdapat kendala yang mempengaruhi pembangunan yang sehat. Berdasarkan hal tersebut, agar tidak terjadi ketimpangan terhadap pembangunan kesehatan antar daerah, maka perlu dilakukan perbaikan sistem jaminan kesehatan masyarakat. Menurut Sistem Kesehatan Nasional pembangunan kesehatan adalah masyarakat, negara, dan negara yang bercirikan penduduknya, penduduk tersebut hidup dalam lingkungan yang sehat, memiliki gaya hidup bersih dan sehat (PHBS), serta memiliki kemampuan berkeadilan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata (Depkes 2013).

Pemerintah telah melaksanakan berbagai macam program kesehatan untuk menciptakan kesejahteraan kesehatan masyarakat, dimana salah satunya adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dilandasi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Program jaminan kesehatan sosial ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dari tahun 2005. Hal ini diawali dengan mencanangkan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diperuntukan kepada Masyarakat Miskin / JPKMM, yang mana program ini lebih dikenal dengan program Askeskin (2005-2007). Namun pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 program Askeskin berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Kemudian pada tahun 2014 program Jaminan Kesehatan (JKN) kembali dimulai yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Penyelenggaraan kegiatan Jaminan kesehatan oleh BPJS diatur Undang-Undang nomor 24 tahun 2011,

tentang BPJS. Program jaminan kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu upaya yang dilakukan agar kesehatan perorangan bersifat komprehensif dan bermutu, yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Kemenkes, 2011).

Penyelenggaraan JKN membutuhkan persiapan baik itu dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Penyelenggaraan jaminan kesehatan diharapkan mampu menyelenggarakan semua subsistem baik itu dari segi pembiayaan, pelayanan, obat-obatan, alat pendukung, maupun sumber daya manusia serta pengawasan kegiatan. Hal ini diharapkan dapat tercapai keselarasan antar semua subsistem dan mendukung penyelenggaraan jaminan kesehatan yang sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan. Penerapan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat pada tahun 2014, berbagai jenis kesehatan akan dikonsolidasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk itu, semua pihak harus melakukan persiapan, antara lain: 1) fasilitas kesehatan, sistem dan infrastruktur rujukan; 2) pembiayaan dan transformasi rencana dan kelembagaan; 3) regulasi; 4) peningkatan SDM dan kapasitas; 5) Sosialisasi dan publisitas (Kemenkes, 2016).

Dalam rangka mewujudkan hak setiap orang untuk menikmati jaminan sosial sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN menetapkan bahwa rencana jaminan sosial bersifat wajib, sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat yang secara bertahap menyadari pencapaian tersebut. Setiap orang harus berpartisipasi tanpa kecuali. Program jaminan sosial harus mencakup jaminan seluruh kesehatan masyarakat.

Di Negara Indonesia Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berkembang saat ini. Mekanisme pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang mewajibkan semua warga negaranya ikut menjadi anggota dalam program tersebut. Namun tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, terutama di masyarakat pedesaan dan pinggiran kota, meskipun masyarakat mengetahui bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian yang akan menimbulkan resiko kerugian, tidak semua orang dapat memutuskan untuk

mengikuti program jaminan kesehatan tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan / kekayaan, jenis kelamin, gaya hidup dan distribusi penduduk. Hal senada juga dikemukakan oleh Mulyadi dalam Maharani (2014), yang menyebutkan bahwa terdapat tujuh (7) faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk mau ikutserta pada program jaminan sosial, diantaranya : usia, tingkat pendidikan, matapencarian, pendapatan, jenis kelamin, status sosial, dan sebaran penduduk.

Partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman tentang asuransi kesehatan. Pengukuran tingkat kesadaran, Pengetahuan dan pemahaman dapat diketahui dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan. Status sosial, pendidikan, pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk menguji hubungan antara karakteristik seseorang dan kesadaran dan pengetahuannya tentang asuransi kesehatan (Siswanto, dkk, 2015). Conyers (1991 dalam Ishak, Rostin, Nusantara 2016) mengemukakan pentingnya partisipasi sebagai berikut : pertama, Partisipasi masyarakat merupakan sarana untuk memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang mana Jika tidak ada rencana pembangunan, proyek akan gagal : kedua, jika masyarakat merasa terlibat dalam program pembangunan, maka mereka akan lebih mempercayai proyek atau pembangunan tersebut.

Dalam pelaksanaan proses pembangunan partisipasi dianggap dapat meningkatkan kemampuan (pemberdayaan) seseorang yang terlibat langsung ataupun yang tidak, karena mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan jangka panjang. Prinsip-prinsip partisipasi yang tertuang dalam "Pedoman Pelaksanaan Metode Partisipasi" yang disusun oleh Departemen Pembangunan Internasional (DFID) adalah: cakupan b. Kesetaraan dan kemitraan c. Transparansi d. Kesetaraan dan kewenangan, e. Tanggung jawab yang sama; f. Otorisasi, g. Kerja sama.

Transparansi di prinsip-prinsip partisipasi berkaitan erat dengan keterbukaan informasi. Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan penjelasan dalam menyelenggarakan suatu Negara atau pemerintahan, dimana melalui tata pemerintahan yang baik (*Good*

Governance), serta jaminan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Penegakan hukum yang adil dan profesional merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan dari Undang-Undang tersebut dapat terlaksana.

Bab 1, Bab 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa informasi mengacu pada data, fakta dan penjelasan yang mengandung nilai, makna dan informasi, pernyataan, gagasan dan simbol tersebut dapat dikemas. Data, fakta dan penjelasan yang disajikan, serta format yang disajikan didasarkan pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi elektronik dan non elektronik. Sedangkan lembaga publik adalah lembaga administratif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya terkait dengan penyelenggaraan negara, sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan / atau APBD, sehingga lembaga publik harus terbuka untuk umum. Informasi publik diartikan sebagai informasi yang didapatkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima oleh sistem administrasi negara dan lembaga publik yang terlibat sesuai dengan Undang-Undang tersebut, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat banyak.

Sedangkan dalam pengimplementasian keterbukaan informasi adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi adalah Sebagai penyebarluasan informasi (prosedur, kebijakan, regulasi) dari satu pihak (pemilik program, kebijakan, regulasi) ke pihak lain (pejabat, masyarakat yang terkena program, dan masyarakat). Sosialisasi adalah bentuk strategis penyebaran informasi. Komunikasi berperan dalam mensosialisasikan nilai-nilai masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi sebagai proses aktivitas yang terjadi secara dinamis. Sosialisasi juga bertujuan sebagai sarana untuk melestarikan, menyebarluaskan, dan mewarisi nilai, norma, dan kepercayaan yang terdapat dalam masyarakat agar seluruh anggota masyarakat dapat menjaga nilai, norma dan kepercayaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016), tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada

pekerja bukan penerima upah di Desa Kasiyah Timur, didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang berpartisipasi menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu pendidikan, pengetahuan, pendapatan, persepsi, motivasi, dengan niat memiliki pengaruh terhadap partisipasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dari rekapan kepesertaan BPJS Wilayah Padang di Provinsi Sumatera Barat Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dengan capaian peserta sejak tahun 2014 dengan jumlah kepesertaan JKN sebanyak 133,42 juta jiwa (101,55%) dari target pencapaian sebanyak 131,38 juta jiwa, tahun 2015 dengan jumlah kepesertaan 156,79 juta jiwa (92,96%) dari target pencapaian 168,66 juta jiwa, tahun 2016 dengan jumlah kepesertaan sebanyak 171,94 juta jiwa (91,12%) dari target pencapaian sebanyak 188,70 juta jiwa dan tahun 2017 jumlah kepesertaan 187,98 juta jiwa (93,19%) dari target pencapaian sebanyak 201,72 juta jiwa (BPJS Kesehatan 2017).

Sedangkan untuk data kepesertaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 sampai Tahun 2018

NO	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepesertaan JKN	%
1	2014	365.389 Jiwa	170.629 Jiwa	46,7
2	2015	368.985 Jiwa	184.198 Jiwa	49,9
3	2016	372.500 Jiwa	190.976 Jiwa	51,3
4	2017	376.072 Jiwa	209.357 Jiwa	55,6
5	2018	379.514 Jiwa	214.188 Jiwa	56,4

Sumber : Laporan Tahunan Seksi JKN Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas penulis ingin melakukan penelitian tentang Hubungan Keterbukaan Informasi dan Penggunaan Media dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dapat diketahui bahwa masih rendahnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini

dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut jadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), selain itu adanya keterbukaan informasi dan penggunaan media juga memberikan pengaruh pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan latar belakang diatas, dapat difokuskan penelitian dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan antara keterbukaan informasi dengan tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut jadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana hubungan antara Penggunaan media Program Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) dengan tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut jadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui hubungan antara keterbukaan informasi dengan partisipasi masyarakat jadi peserta Jaminan Kesehatan Nasioanal (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Mengetahui hubungan antara penggunaan media Program Jaminan Kesehatan Nasioanal (JKN) dengan tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut jadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lima Puluh Kota

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam rangka peningkatan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pengembangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Indonesia Sehat
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
3. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Pasca Sarjana Pengembangan Wilayah Pedesaan sebagai penerapan ilmu

Pembangunan Wilayah dan Desa dan merupakan pengalaman yang berharga bagi saya karena menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang pembangunan Desa / Nagari

